

Memorialisasi yang Tertunda: Memori Kekerasan Aceh dan Upaya Mendapatkan Rekognisi

Ejodia Kakunsi^{a,*}

^aSekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta

* ejodia.kakunsi@stftjakarta.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas kondisi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang mengalami konflik bersenjata selama sekitar 30 tahun dan bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami. Penelitian dilakukan dalam konteks proyek kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas yang melibatkan Solidaritas Perempuan Aceh dan Johanniter Unfall Hilfe. Fokus utama adalah kondisi pascakonflik dan upaya membangun kesiapsiagaan bencana serta bagaimana masyarakat mengatasi trauma. Kisah Salma, seorang perempuan yang menyaksikan kekerasan selama konflik, dijadikan studi kasus. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi selama pelatihan kesiapsiagaan bencana. Hasil penelitian mengungkapkan tantangan membangun kembali sosial setelah konflik, ketidakpastian terkait keberadaan keluarga yang hilang, dan kendala dalam mendapatkan rekognisi atas pengalaman traumatis. Upaya memori kolektif dan rekognisi, seperti memorialisasi, dianggap penting untuk proses penyembuhan masyarakat. Makalah ini memberikan wawasan tentang kompleksitas kondisi pascakonflik dan dampaknya terhadap upaya rekonstruksi sosial di Aceh.

Kata Kunci: Memorialisasi, Kekerasan Aceh, Rekognisi

Delayed Memorialization: Memories of Aceh's Violence and the Effort to Gain Recognition

This article discusses the condition of the community in Bener Meriah Regency, Aceh, which has experienced armed conflict for around 30 years and natural disasters, including earthquakes and tsunamis. The research was conducted in the context of a community-based disaster preparedness project involving Aceh Women's Solidarity and Johanniter Unfall Hilfe. The main focus is post-conflict conditions and efforts to build disaster preparedness and how communities deal with trauma. The story of Salma, a woman who witnessed violence during the conflict, is used as a case study. The research method uses a qualitative approach with interviews and observations during disaster preparedness training. The research results reveal the challenges of social reconstruction after conflict, uncertainty regarding the whereabouts of lost family, and obstacles in gaining recognition for traumatic experiences. Collective memory and recognition efforts, such as memorialization, are considered essential to the healing process of society. This paper provides insight into the complexity of post-conflict conditions and their impact on social reconstruction efforts in Aceh.

Keywords: Memorialization, Aceh Violence, Recognition

Pendahuluan

Sembilan tahun sesudah perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005, jelang sepuluh tahun peringatan bencana dahsyat tsunami yang memporak-porandakan Aceh, saya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah tinggi Gayo tepatnya kabupaten Bener Meriah. Kabupaten ini tidak mengalami dahsyatnya tsunami, namun bencana alam tentu akrab dengan mereka. Pada Juli 2013, gempa

bumi mengguncang wilayah ini yang menewaskan lebih dari 20 orang (BBC News Indonesia website 2013). Bersama dengan Solidaritas Perempuan Aceh (SP Aceh), saya mewakili die Johanniter Unfall Hilfe, sebuah organisasi internasional Jerman yang berfokus pada kedaruratan dan bencana, memulai proyek kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Pengalaman bencana alam bagi warga di sini dengan ringan mengalir ketika mereka mendiskusikan sejarah bencana, trauma yang diakibatkannya dan bagaimana membentuk sebuah tim kesiapsiagaan bencana. Tidak demikian halnya ketika, secara individu dalam percakapan di luar konteks bencana alam, konflik bersenjata Aceh yang berlangsung sekitar 30 tahun, disinggung.

Sebagian besar masyarakat walaupun tidak mengalami langsung kedahsyatan tsunami, memegang teguh solidaritas kemanusiaan karena mereka hidup di negeri yang sering dilanda gempa bumi dan ancaman letusan gunung. Bener Meriah terletak di kaki gunung berapi Burni Telong yang di balik keindahan dan kesuburan tanahnya menyimpan potensi bahaya yang dapat mengancam nyawa penduduknya. Pada 2014 tersebut, sekitar 15 bulan sesudah gempa Bener Meriah, pembangunan kembali rumah-rumah penduduk serta pemberian kompensasi akibat kerugian yang ditimbulkannya sudah berjalan bahkan masuk pada tahap akhir. Rekonstruksi pasca bencana, yang didasarkan pada pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-tsunami Aceh, memang menunjukkan tingkat pencapaian yang memuaskan karena baik masyarakat, pemerintah maupun organisasi-organisasi kemanusiaan bekerja dengan sangat cepat dan terlatih. Penilaian yang sama tidak dapat dengan begitu saja dikenakan pada rekonstruksi sosial pascakonflik politik Aceh.

Makalah ini akan memperlihatkan kondisi tersebut berdasarkan perjumpaan saya dengan penduduk lokal Bener Meriah dan pengamatan selama melakukan kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana di lima desa di tiga kecamatan di Bener Meriah yang dimulai Desember 2014 hingga Desember 2015. Ini adalah sebuah upaya awal untuk menggali kisah-kisah para korban konflik yang dapat dijadikan basis penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih dalam jika penelitian kualitatif seputar trauma komunal hendak dilakukan. Saya berpendapat, sebuah upaya memorialisasi yang dimulai dengan mendengarkan narasi perempuan di wilayah pascakonflik perlu dilakukan untuk membangun sebuah kesadaran dan pengakuan sosial akan pengalaman partikular yang mereka alami. Kisah Salma akan dituturkan di sini sebagai interlokutor sekaligus saksi kekerasan yang terjadi selama konflik bersenjata. Bersama para perempuan lain mereka harus berusaha membangun sebuah sistem bertahan ketika para laki-laki di kampungnya memutuskan untuk pergi bergerilya dengan kelompok GAM atau ketika mereka ditangkap di rumah atau ladang mereka atas tuduhan bekerja sama dengan para pemberontak.

Kisahnyanya yang akan penulis periksa dengan dibantu oleh literatur-literatur penunjang. Diharapkan upaya ini akan menolong pembaca dalam menyusun sebuah desain penelitian seputar trauma kolektif khususnya yang terjadi di Aceh.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses pengolahan kasus secara ilmiah. Dalam penelitian ini dengan fokus penelitian "Memori Kekerasan Aceh dan Upaya Mendapatkan Rekognisi". Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi selama pelatihan kesiapsiagaan kekerasan di Aceh.

Hasil dan Pembahasan

1. Kisah Salma, Peziarahan yang Tertunda

Salma, kader SP Aceh, menuturkan kisah ini di dapur rumahnya yang kami gunakan untuk menginap pada awal pelaksanaan proyek mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Sambil memasak, ia memulai menceritakan mengenai peristiwa di tahun 2003 ketika Operasi Terpadu diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah operasi militer kesekian selain rangkaian operasi militer yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1989.¹ Abangnya dijemput di rumah orang tuanya dengan tuduhan terlibat gerakan separatis GAM.

Salma menyaksikan aksi kekerasan saat penjemputan tersebut yang, pada saat itu, bagi penduduk lokal adalah pengalaman keseharian. Seolah hari itu adalah giliran keluarganya yang mengalami kekerasan, ayahnya pun yang membela anaknya ikut dipukuli karena menghalang-halangi. Sejak hari itu, dia tidak pernah berjumpa dengan abangnya. Mereka telah berusaha mencari, namun kondisi konflik menjadi ancaman juga bagi perempuan yang berusaha mencari keluarganya karena mereka akan ikut dituduh separatis. Banyak perempuan dan orang lanjut usia diisolasi di *gampong* mereka dan setiap upaya untuk bertemu dengan suami, ayah, atau saudara laki-laki mereka dapat berakibat penghukuman atau kehilangan nyawa.

Sesudah perjanjian damai Helsinki, keluarga-keluarga menuntut penjelasan mengenai di mana keluarga mereka. Bertahun-tahun sesudah itu mereka masih berusaha mendapatkan kabar mengenai keluarga mereka. Menurut Salma, orang-orang di kampungnya, Bener Ayu, yakin bahwa ada sebuah tempat yang dipakai mengubur keluarga mereka. Pada 2013 sebuah tanda peringatan berupa kain putih pun dipasang mengelilingi sebuah lapangan dekat sekolah dasar setempat. Ini dilakukan dengan pengetahuan pemerintah setempat dan pihak aparat keamanan.

Menurut mereka tempat yang ditandai itu adalah kuburan para korban. Masyarakat pun merasa bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk melakukan ziarah setelah bertahun-tahun mencari. Namun tidak lama kemudian kain peringatan itu dicabut karena dikatakan bahwa anak-anak sekolah sering mengalami kerasukan sejak ditetapkannya lokasi ziarah tersebut. Salma dan keluarga-keluarga yang lain kembali mengalami ketidakpastian bahkan hingga hari ini karena tidak adanya pengakuan serta kepastian mengenai lokasi kuburan keluarga mereka. Pertanyaan mengenai di mana keberadaan keluarga mereka terus menghantui sebagaimana memori kekerasan yang mereka alami tahun-tahun sebelum perjanjian damai dilaksanakan.

2. Sejarah Kekerasan dan Duka Aceh

Sebelum peristiwa tsunami 26 Desember 2004, orang mengenal Aceh karena konflik bersenjata yang berlangsung di propinsi tersebut. Pemberitaan seputar Aceh tidak pernah lepas dari laporan mengenai kontak senjata serta jatuhnya korban baik dari pihak GAM maupun dari pihak militer dan brimob. Jika lembaran-lembaran sejarah Aceh dibuka kembali, akan ditemui bahwa peristiwa perang dan kekerasan lebih mendominasi kisah-kisah mereka selain gambaran heroik perjuangan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien yang dibaca dalam buku-buku sejarah. Anthony Reid, sejarawan yang banyak menulis sejarah Melayu, Batak dan Aceh, mengulas dengan sangat rinci peristiwa-peristiwa dan tahun-tahun penuh pertumpahan darah dalam bukunya *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Salah satu yang terekam dalam bukunya, yaitu mengenai penaklukan Aceh secara utuh oleh Belanda pada 1913 setelah empat puluh tahun perang. Sebelumnya, pada 1903 Belanda berhasil menundukkan para pemimpin terkemuka Aceh. Dilaporkannya bahwa

¹ Rahmani P. Dyah, *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh* (Banda Aceh: Institute for Civil Society Empowerment, 2001), 9.

perang Aceh dengan jangka waktu mulai dari 1903 tersebut 20,000 orang Aceh terbunuh.² Perlawanan demi perlawanan dilaporkan termasuk selama masa kolonial Belanda hingga masuknya Jepang.

Masyarakat sendiri terpolarisasi sehingga secara internal muncul berbagai pemberontakan yang terjadi sesudah Jepang menyerah kalah, dan sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Reid mencatat bahwa apa yang sepertinya perang sipil terjadi di Pidie di mana para *uleebalang* yang berpihak kepada Belanda mengalami perlawanan dari pihak Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berpihak pada republik yang masih baru itu. Teuku Muhammad Daud dari Cumbok, salah seorang *uleebalang* yang nekad dan dinilai agak sembrono ingin mempertahankan *status quo* dengan mengatakan bahwa Indonesia belum siap merdeka. Opiniya tersebut ditentang oleh Daud Beureuh, pemimpin terkemuka PUSA serta para pemuda pejuang republik. Muhammad Daud adalah seorang bangsawan yang cukup berpengaruh dan kaya yang mampu mempersenjatai kaum bangsawan dan para pengikutnya. Terjadilah perlawanan yang disebut Revolusi Sosial yang dimulai pada 03 Desember 1945 hingga 16 Januari 1946 di mana banyak yang gugur dalam apa yang dikenal dengan Perang Cumbok itu.³

Setelah Revolusi Sosial tersebut, Aceh memasuki masa hidup sebagai bagian dari Republik Indonesia dengan budaya Islaminya yang bertumbuh dengan kental dengan para ulama yang memegang peranan cukup kuat. *Dayah* atau pendidikan Islam menjadi pusat pengembangan diri dan pengetahuan orang Aceh yang membentuk budaya bahkan yang ikut menentukan dinamika politik Aceh.⁴ Al-Chaidir memberikan analisisnya bahwa Aceh mengalami perubahan yang justru tidak lebih menguntungkan karena selama tahun-tahun sesudah kemerdekaan Indonesia, Aceh tetap sebagai daerah yang tertinggal secara ekonomi dan dianaktirikan. Peran para ulama yang semula justru mendukung kemerdekaan Indonesia disepelkan. Pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Daud Beureuh pun pecah. Mereka menginginkan terbentuknya negara Islam Indonesia. Dicatat oleh Chaidir bahwa dalam pemberontakan yang berlangsung selama 1953-1954 saja ditemukan 271 kasus pembunuhan, 117 kasus penculikan, 676 kasus pembakaran dan 247 kasus perampokan.⁵ Dalam pergolakan seperti ini, tentu saja berjatuhnya korban warga sipil tak bersenjata yang pekerjaan mereka hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari seperti para petani. Meskipun pemberontakan tersebut bisa ditumpas, namun gejolak menuntut kemerdekaan tidaklah padam.

Pada perkembangan selanjutnya, meskipun industri mulai masuk ke Aceh dengan perusahaan minyak dan gas, namun sumber daya tersebut tidak digunakan untuk membangun Aceh. Peran para ulama pun perlahan-lahan berkurang bahkan cenderung dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan 'pembangunan ala Soeharto.' Ditambah dengan ekspansi dunia material dan teknologi Aceh kemudian terpasung dalam politik Orde Baru.⁶ Aceh tetap dinilai sebagai kaum separatis apalagi dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro pada 1976. Oleh pemerintah Indonesia kelompok ini disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan Gerakan Pengacau Liar (GPL). Operasi penumpasan pun diberlakukan dan yang menjadi catatan yang paling buruk dari era pemerintahan Soeharto selama penanganan konflik Aceh adalah masa-masa pemberlakuan DOM Aceh antara 1989-1998. Temuan-temuan Tim Pencari Fakta (TPF) dan forum gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilaksanakan selama operasi DOM dan sesudah kejatuhan Soeharto menunjukkan angka yang sangat mengejutkan.

² Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatera* (London: Oxford University Press, 1979), 7.

³ Ibid, 195-204.

⁴ Al Chaidir, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 55.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Gambaran statistik pada 1990-1991 saja dari 10 daerah tingkat II tercatat penurunan jumlah penduduk. Di Pidie sendiri pada 1990 tercatat ada 23.366 orang janda atau 5,5% dari total jumlah penduduk. Pada 1991 jumlah tersebut meningkat menjadi 24.000 orang. Menurut Chaidir, masa-masa tersebut adalah masa di mana operasi militer digencarkan. Jumlah penduduk perempuan menjadi lebih tinggi dari pada laki-laki karena banyak dari kaum laki-laki yang, kalau tidak ikut bergerilya, ditangkap, hilang atau terbunuh selama masa DOM.⁷

Dyah menyebut apa yang terjadi di Aceh sebagai 'kekerasan tanpa batas.' Hasil investigasi berupa terstimoni masyarakat yang dihimpun baik oleh LSM Cordova maupun Forum Peduli HAM Pidie yang menjadi rujukan Al-Chaidir membuktikan hal tersebut. Berbagai bentuk tindakan penyiksaan yang berakhir pada terbunuhnya korban, pembakaran, pemerkosaan serta intimidasi terhadap rakyat didaftarkan dan dikategorikan sebagai yang paling sadis yang dilakukan terhadap warga sipil. Ironisnya, banyak juga penduduk setempat yang terlibat sebagai *cuak* atau Tenaga Pembantu Operasi (TPO) yang saat DOM dicabut mereka tidak setuju karena jika hal tersebut dilakukan, nyawa mereka yang akan terancam.⁸ Penduduk yang aslinya adalah transmigran dari luar Aceh adalah pihak yang paling dicurigai oleh penduduk lokal sebagai *cuak* walaupun tentu saja tidak semua bisa dibuktikan keterlibatannya. Salma, dalam percakapan di dapur rumahnya, sempat mencetuskan ketidakpercayaannya terhadap beberapa orang dari kampung lain yang adalah kampung transmigran Jawa. Beberapa kampung tersebut juga ikut masuk dalam proyek penanggulangan bencana yang didampingi SP Aceh. Di dataran tinggi Gayo pada masa operasi militer terpadu khususnya pada tahun 2001-2004 kaum pendatang yang merasa harus ikut membela NKRI membentuk kelompok-kelompok seperti Putra Jawa Kelahiran Sumatera (pujakesuma), Front Pembela Tanah Air, Front Pembela Merah Putih dan sebagainya. Penduduk lokal merasa terjepit akibat meruncingnya polarisasi di kalangan masyarakat, sementara gelombang pengungsi yaitu mereka yang adalah transmigran Jawa, keluar dari tanah Gayo menuju Medan.⁹

Duka serta trauma Aceh akibat konflik yang cukup panjang seolah-olah mencapai puncaknya ketika mereka diperhadapkan dengan kehancuran dan kehilangan yang sangat tiba-tiba sewaktu gempa dan Tsunami menyapu rata wilayah-wilayah pesisir Aceh. Semua pihak yang bertikai, baik GAM maupun pemerintah Indonesia dan terlebih lagi masyarakat umum, kehilangan keluarga dan harta milik mereka hanya dalam hitungan menit. Aceh memasuki masa yang sangat traumatis ketika dalam kondisi porak-poranda dan kebingungan mencari anggota-anggota keluarga mereka yang hilang terseret dahsyatnya gelombang tsunami, mereka masih harus menghadapi ancaman keamanan akibat konflik bersenjata yang belum reda. Ribuan pekerja kemanusiaan yang memasuki Aceh dalam usaha untuk membantu proses tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi terus menerus mendapatkan peringatan mengenai status keamanan Aceh. Meskipun demikian, secara bersamaan Aceh yang terisolir dan terkontrol mulai secara perlahan-lahan terbuka dan tidak dapat dihindarkan lagi, pemberitaan-pemberitaan ke media internasional merebak. Kondisi ini ikut merubah kondisi di lapangan meskipun konflik bersenjata masih terjadi di wilayah-wilayah pegunungan yang jauh dari kawasan pesisir yang sudah hancur oleh terjangan tsunami.

Dampak dari tsunami dalam bentuk kerusakan dan kehilangan yang jauh lebih besar dari kehilangan selama tahun-tahun yang dipenuhi konflik mejadi sebuah kewajiban moral bagi kedua pihak yang bertikai. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM pimpinan Hasan Tiro tidak dapat lagi mengelak dari penghentian darurat militer dan perlawanan bersenjata. Pada 15 Agustus 2005, bertempat di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani piagam perdamaian yang menjadi tanda dihentikannya semua

⁷ Ibid, 96-97.

⁸ Ibid, 199.

⁹ Irine Hiraswati Gayatri, *Bangkit Dari Konflik: Potret Kelembagaan Kampung Ramung Jaya, Tanah Gayo* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 181.

bentuk pengurangan kekuatan senjata dan konflik Aceh.¹⁰ Dengan perjanjian ini, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan terkait tsunami mulai merasakan pentingnya mempromosikan *peace building* lewat program-program yang tentu saja dengan ketersediaan dana yang tidak sedikit hal itu menjadi sangat memungkinkan.¹¹ Terbukanya kesempatan untuk masuk dan bekerja di wilayah-wilayah yang dulunya dianggap paling berbahaya seperti Pidie dan Aceh Tengah mengantar para pekerja kemanusiaan untuk mengetahui lebih banyak apa yang sebenarnya terjadi selama masa konflik. Seiring dengan itu, trauma akibat kekerasan pun menyeruak perlahan-lahan ke permukaan. Masa rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami berhadapan dengan tantangan rekonstruksi sosial akibat konflik. Berbagai monumen peringatan tsunami dibangun di banyak wilayah di Aceh seperti Ulee Lheue di Banda Aceh, kuburan massal di Leupung dan museum tsunami di Banda Aceh namun monumen peringatan mereka yang hilang akibat konflik, sepertinya masih jauh panggang dari api.

3. Memorialisasi: Perjuangan Mendapatkan Rekognisi

Monumen-monumen peringatan atas dampak yang ditimbulkan oleh bencana tsunami yang berdiri di beberapa wilayah di Aceh mengundang banyak orang termasuk wisatawan asing untuk datang ke Aceh. Museum dan lokasi-lokasi terdampak paling parah selain menjadi tempat berkunjung juga menjadi lokasi edukasi masyarakat mengenai bagaimana mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Meskipun jumlah pekerja kemanusiaan serta organisasi pemberi bantuan internasional yang melakukan intervensi ke Aceh cukup banyak dengan berfokus pada pembangunan kembali Aceh, namun intervensi mereka belum menyentuh isu-isu konflik. Tidak sedikit organisasi yang mengalokasikan anggaran khusus untuk trauma *healing* atau *psycho social support*, namun karena proyek pembangunan kembali yang lebih terfokus pada infrastruktur maka pemulihan trauma tidak dilihat secara menyeluruh serta tidak menyentuh isu-isu yang saat itu sangat sensitif yang diakibatkan oleh masa lalu yang penuh kekerasan. Catherine Smith, seorang antropolog dan *cross-cultural psychiatrist* yang memulai penelitiannya mengenai trauma pascakonflik Aceh pada 2008 menemukan beberapa alasan mengapa trauma psikologis kurang mendapat perhatian terutama dalam hubungan dengan konsultasi psikologis. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat saja terlalu sedikit jumlah psikiater yang tersedia di propinsi tersebut. Dilaporkannya bahwa hanya terdapat 4 tenaga psikiater di Aceh dibandingkan jumlah penduduk Aceh yang 4 juta orang. Jumlah ini tentu saja sangat jauh dari memadai mengingat konflik berkepanjangan dan bencana dahsyat yang pernah dialami masyarakat di sana.¹²

Smith juga mendapati bahwa kebanyakan anggota masyarakat yang mengalami trauma memilih untuk berobat ke penyembuh lokal yang lebih mereka percayai, karena memakai pendekatan agama, daripada ke psikiater. Lembaga-lembaga penyedia layanan resmi sepertinya cukup menjadi momok bagi penduduk lokal. Karena itu, mereka sepertinya tahu bagaimana memperlakukan orang yang mengalami gangguan jiwa akibat trauma berat dengan memakai istilah-istilah yang lebih halus atau eufemisme. Masyarakat juga sepertinya memilih menyelesaikan dengan cara mereka sendiri ketika anggota keluarganya mengalami gangguan mental yaitu dengan cara pasung. Bagi keluarga, dari pada penderita membawa aib bagi keluarga atau tidak kembali lagi sesudah ditahan di rumah sakit jiwa, mereka lebih baik 'mengawasinya' dengan ketat di rumah.¹³ Jika dianalisa lebih dalam, membandingkan juga

¹⁰ Patrick Barron and Adam Burke, *Supporting Peace in Aceh: Development Agencies and International Involvement* (Washington: East-West Center, 2008), 16.

¹¹ Ibid.

¹² Catherine Smith, *Resilience and The Localisation of Trauma in Aceh, Indonesia* (Singapore: National University of Singapore, 2018), 6-7.

¹³ Ibid.

dengan kisah Salma mengenai anak-anak sekolah yang sering mengalami kerasukan, intervensi sosial lebih dapat diterima masyarakat dari pada intervensi badan-badan resmi bagi masyarakat Aceh yang sedang berupaya memulihkan diri dari kekerasan masa lalu. Pengetahuan lokal orang mengenai trauma yang digambarkan dengan wujud kerasukan, dan karena itu perlu ada pengusiran roh atau jin seperti yang ditemui Smith di Aceh, masih lebih dicari dan dipercayai mereka.¹⁴ Hal ini juga berarti proses sosial, oleh masyarakat, sedang berlangsung.

Sementara itu, harapan terwujudnya sebetuk memorialisasi sebagai wujud rekognisi untuk para korban seperti yang teretus dari tuturan Salma tidak dapat disepelekan. Konflik Aceh yang sangat sarat dengan ketidakadilan memberi dampak cukup berat kepada korban dan keluarga sehingga tuntutan akan pengungkapan dan pengakuan menjadi sesuatu hal yang mendesak di tengah-tengah upaya mereka memulihkan trauma. Memorialisasi tentu dapat mengambil berbagai cara seperti yang dilakukan terhadap para korban tsunami. Judy Barsalou dan Victoria Baxter menjelaskan makna dari memorialisasi,

*Memorialization is a process that satisfies the desire to honor those who suffered or died during conflict and as a means to examine the past and address contemporary issues. It can either promote social recovery after violent conflict ends or crystallize a sense of victimization, injustice, discrimination, and desire for revenge. Memorialization occurs throughout the conflict life circle: before conflict begins, during conflict, and after conflict ends. Memorialization initiatives take different forms depending on who initiates them, the stage of the conflict at which they are initiated, and the kind of society that emerges after the violence ends. Thus, memorialization is a highly politicized process that reflects the will of those in power.*¹⁵

Sebuah bentuk rekognisi atas dasar kewajiban moral bagi masyarakat Aceh pascakonflik telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan memberikan hak politik berupa pendirian Partai Aceh. Segera sesudah penyerahan dan pemusnahan senjata-senjata yang dipakai para gerilyawan GAM serta terjaminnya perjanjian damai Helsinki berjalan lancar, Irwandi Yusuf, mantan pemimpin GAM terpilih menjadi gubernur propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada Februari 2007. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang menjadi penanda bahwa Aceh yang damai sedang berlangsung. Meskipun demikian, percakapan dengan Salma, di pagi bulan Desember 2014 itu dapat dikatakan mewakili apa yang menjadi kebutuhan para korban: sebuah bentuk rekognisi lain yaitu tempat mereka untuk menjalankan ritual penganangan akan keluarganya. Hal yang sama terjadi dalam hubungan dengan identitas kolektif mereka karena kekerasan tidak saja memunculkan trauma tetapi ia juga menciptakan individu-individu yang membentuk perubahan wajah dari suatu masyarakat.

Berbicara dari konteks Barat, dalam hal ini dari peristiwa Holocaust yang mendera memori baik para penyintas dan keluarga maupun mereka yang membaca berita serta kisah-kisah yang dibukukan maupun yang difilmkan serta monumen-monumen yang didirikan, Jeffrey C. Alexander memberikan argumen sosiologisnya mengenai simbolisasi dari peristiwa traumatis. Dijelaskannya,

"Experiencing trauma" can be understood as a sociological process that defines a painful injury to the collectivity, establishes the victim, attributes responsibility, and distributes the ideal and material consequences. Insofar as traumas are so experienced, and thus imagined and represented, the collective identity will shift. This reconstruction means that there will be a searching re-remembering of the collective past, for memory is not only social and fluid but also deeply connected to the contemporary sense of the self. Identities are continuously constructed and secured not only by facing the present and future but also by reconstructing the collectivity's earlier life.' Once collective identity has been reconstructed, there will eventually emerge a period of "calming down." The spiral of signification flattens out, affect and emotion become less inflamed,

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Judy Barsalou and Victoria Baxter, *The Urge To Remember: The Role of Memorials in Social Reconstruction and Transitional Justice. Stabilization and Reconstruction Series 5*, 2007, 1.

*preoccupation with sacrality and pollution fades. Charisma becomes routinized, effervescence evaporates, and liminality gives way to reaggregation. As the heightened and powerfully affective discourse of trauma disappears, the "lessons" of the trauma become objectified in monuments, museums, and collections of historical artifacts. The new collective identity will be rooted in sacred places and structured in ritual routines.*¹⁶

Di Aceh yang kini diperintah oleh seorang gubernur mantan pemimpin GAM yang berpengaruh proses mendapatkan rekognisi sepertinya menuntut sebuah perjuangan panjang. Berada pada posisi, ketika konflik berlangsung, sebagai lawan dari pemerintah Indonesia yang berkuasa, pemerintah Aceh kini ditantang untuk mengambil kebijakan sebagai bagian dari kewajiban moralnya.

Sebuah proses rekognisi, dalam konsep Hegel, menuntut sebuah tindakan resiprokal di mana subyek mengenali satu dengan yang lain dan karena itu secara emosional saling membutuhkan layaknya orang tua kepada anak dan sebaliknya.¹⁷ Dalam hubungan dengan konteks masyarakat yang mengalami konflik dan trauma, dapat dilihat di sini bahwa sebuah rekognisi diperlukan upaya melihat kebutuhan psikologis sebuah masyarakat dalam hal ini masyarakat yang terluka atau lebih tepatnya, yang anggota-anggotanya didera luka akibat kekerasan. Axel Honneth, menyandingkan konsep pemikiran Hegel di atas dengan konsep George Herbert Mead yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan adalah sebuah tindakan yang tidak hormat terutama terhadap integritas diri seseorang. Honneth menulis, "*because the normative self-image of each and every individual human being is dependent on the possibility of being continually backed up by others, the experience of being disrespected carries with it the danger of an injury that can bring the identity of the person as a whole to the point of collapse*".¹⁸ Luka yang diakibatkan oleh tindak kekerasan baik fisik akibat penyiksaan maupun penghinaan dalam bentuk pemerkosaan menyisakan kerusakan pada tubuh dan integritas diri yang panjang pada seseorang. Kehilangan kepercayaan terhadap diri dan lingkungan sosial adalah hal lain. Karena itu, masih mengutip Honneth, "*the kind of recognition that this type of disrespect deprives one of is the taken for granted respect for the autonomous control of one's own body, which itself could only be acquired at all through experiencing emotional support as part of the socialization process*".¹⁹

Dalam konteks Aceh, proses rekognisi resiprokal ini dapat berwujud pada suatu bentuk rasa solidaritas yang akan menuntun pada diberikannya perhatian pada suatu tanda tanya besar mengenai keberadaan keluarga yang hilang selama konflik. *Love and rights*, demikian Honneth, adalah unsur lain dari sebuah rekognisi selain penghormatan yang dapat dipersembahkan kepada rakyat Aceh yang trauma mereka diperberat oleh berbagai pertanyaan mengenai anggota keluarga mereka yang belum kembali. Solidaritas sebagai sebuah bentuk komunikasi dalam kerangka etik masyarakat membuka jalan pada sebuah pengakuan akan adanya pergulatan masyarakat meraih kepastian yang terus bergema dari masa lalu yang kelam.

Kesimpulan

Merenungi kisah Aceh, orang cenderung berpikir bahwa, jika tidak terjadi gempa besar yang memicu tsunami, mungkin tak akan pernah ada damai di negeri itu hingga hari ini. Kompleksitas permasalahan di Aceh, sejarah yang melatarbelakangi konflik serta ikut campur tangannya tangan-tangan kapitalis di sana memungkinkan hal ini terjadi. Aceh yang Islami dan warganya dengan karakter yang kuat dan berani yang terbentuk akibat tahun-tahun panjang

¹⁶ Jeffrey Alexander, *Trauma: A Social Theory* (Cambridge: Polity, 2012), 26.

¹⁷ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict* (Great Britain: Polity Press, 1995), 18.

¹⁸ *Ibid*, 132.

¹⁹ *Ibid*, 133.

dalam perang dari pada dalam damai, kini menjadi salah satu lokus di mana orang menemukan sebuah edukasi mengenai perjuangan dalam banyak hal. Setelah perjuangan meraih pengakuan secara politis sebagai propinsi yang memiliki sistem syariah dengan partai politik yang mengusung semangat perjuangan dari masa lalu, masih ada yang harus mereka raih yaitu pengakuan akan kejahatan yang terjadi selama konflik.

Tuntutan ini, meski tidak selalu terwujud dalam bentuk *political demand* namun keluar dari kesadaran akan kebutuhan kemanusiaan yang mendasar, masih membutuhkan waktu untuk bisa diimplementasikan. Pembangunan kembali Aceh sering dilihat keberhasilannya dari tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami. Berhentinya hiruk pikuk kerja-kerja kemanusiaan di hampir seluruh pelosok Aceh baik yang terdampak tsunami maupun tidak, seharusnya tidaklah menghentikan upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai di mana anggota-anggota keluarga mereka yang hilang. Di sini terlihat kebutuhan akan solidaritas sesama warga yang pernah terbangun selama konflik dan selama masa tanggap darurat. Solidaritas yang sama perlu ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan pengakuan dengan memfasilitasi warganya atau memberi tempat bagi mereka untuk bisa mengenang keluarganya yang hilang selama konflik. Dengan itu, pintu ke arah pemulihan trauma yang utuh dan menyeluruh akan bisa dimulai.

Referensi

- Alexander, Jeffrey. *Trauma: A Social Theory*. Cambridge: Polity, 2012.
- Barron, Patrick, and Adam Burke. *Supporting Peace in Aceh: Development Agencies and International Involvement*. Washington: East-West Center, 2008.
- Barsalou, Judy, and Victoria Baxter. *The Urge To Remember: The Role of Memorials in Social Reconstruction and Transitional Justice. Stabilization and Reconstruction Series 5*, 2007.
- Chaidir, Al. *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Dyah, Rahmani P. *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*. Banda Aceh: Institute for Civil Society Empowerment, 2001.
- Gayatri, Irine Hiraswati. *Bangkit Dari Konflik: Potret Kelembagaan Kampung Ramung Jaya, Tanah Gayo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Great Britain: Polity Press, 1995.
- Reid, Anthony. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. London: Oxford University Press, 1979.
- Smith, Catherine. *Resilience and The Localisation of Trauma in Aceh, Indonesia*. Singapore: National University of Singapore, 2018.
- Verbatim, <https://docs.google.com/document/d/18ML056EVb3LknsduZhRgsq4AYZinhj5d/e/dit?usp=drivesdk&oid=104885922389515173825&rtpof=true&sd=true>.